

## Megawati Presidential Political Policy in 2001 – 2004

Indah Rizki Aruma Nurjannah<sup>a</sup>, Nurul Umamah<sup>b</sup>, Marjono<sup>c</sup>

<sup>a</sup> History Education Program, Jember University,

<sup>b</sup> History Education Program, Jember University, srihandayani@unej.ac.id

<sup>c</sup> History Education Program, Jember University, kayanswastika@unej.ac.id

### Abstract

President Megawati is the fifth president of a unitary state of the republic of Indonesia, during his reign has issued a political policy, both domestic and foreign political policy. The problems in this research are; (1) how was Megawati in the political stage before becoming president of the republic of Indonesia in 2001, (2) how was Megawati's domestic and foreign policy politics of 2001-2004 ?, (3) how was the impact of domestic and foreign policy of President Megawati Year 2001-2004 ?. The purpose of this study is 1. To analyze the involvement of Megawati in the Indonesian political scene in 2001, 2. To analyze domestic and foreign policy of President Megawati in 2001-2004, 3. To analyze the impact of domestic and foreign political policy President Megawati Year 2001-2004. The research method used is historical research method. The conclusion of this research is Megawati's involvement in the Indonesian political stage, becoming the fifth president and issuing domestic and foreign political policies that have an impact on the political, social and economic aspects of Indonesia.

**Keywords:** Megawati, Political Policy.

## PENDAHULUAN

Megawati Soekarnoputri merupakan putri Presiden Republik Indonesia pertama, Sukarno. Lahir tanggal 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Sebagai seorang anak kepala pemerintahan, sudah tentu mempunyai pengalaman hidup yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Pengalaman Megawati pun lebih banyak terkait dengan jabatan sang ayah (Soebachman, 2015:147). Misalnya pengalaman sering ikut bertemu tamu dari luar negeri, sering ikut tampil menari di hadapan tamu di Istana Negara. Bukan hanya pengalaman yang menyenangkan, tapi pengalaman buruk pun pernah Megawati rasakan. Semua pengalaman sebagai anak presiden tersebut pasti membekas dalam ingatan Megawati. Memperkaya pengalaman hidup sekaligus pengalaman berpolitik Megawati di kemudian hari.

Megawati terpilih menjadi presiden pada tahun 2001. Adapun SI – MPR tersebut diselenggarakan dalam rangka menyikapi sikap presiden Gus Dur ketika membekukan lembaga legislatif MPR dan Partai Golkar (Soebachman, 2015:152). Karena pada tanggal 23 Juli 2001 MPR secara resmi “melengserkan” Presiden Gus Dur, otomatis wakil presiden Megawati Soekarnoputri naik jabatan untuk menggantikannya. Presiden Republik Indonesia yang ke – 5 adalah Megawati Soekarnoputri. Megawati merupakan presiden wanita pertama yang dimiliki Indonesia. Ini merupakan sebuah prestasi dan prestisi secara pribadi bagi Megawati.

Masa kepresidenan Megawati tidak lepas dari politik luar negeri. Ada kebijakan politik yang baru dalam pemerintahan Megawati, yaitu memulai berani menjalin kerjasama dengan negara di luar Amerika (Kumolo, 2004:105). Selama melaksanakan politik luar negeri, yang menjadi prioritasnya adalah menjalin hubungan baik dengan negara tetangga, khususnya dengan kawasan ASEAN dan Timur Leste, negara yang pernah jadi bagian NKRI. Megawati keluar masuk negara lain hanya untuk menyelesaikan masalah kerjasama / konflik yang terjadi. Kunjungan itu merupakan satu kebutuhan dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dari para *founding fathers*, yang dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Banyak dinamika yang terjadi saat Megawati menjadi presiden, namun Megawati menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa dia mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup permasalahan yang telah dipaparkan di bagian awal, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut bagaimana Megawati dalam panggung politik sebelum menjadi presiden republik Indonesia tahun 2001 ?, bagaimana kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri Presiden Megawati tahun 2001-2004 ? dan bagaimana dampak kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri Presiden Megawati tahun 2001-2004 ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Megawati dalam panggung politik sebelum menjadi presiden republik Indonesia tahun 2001, untuk menganalisis kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri Presiden Megawati tahun 2001-2004 dan untuk menganalisis dampak kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri Presiden Megawati tahun 2001-2004;

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan menggunakan beberapa langkah pengambilan data yang tercakup dalam empat hal, yaitu Heuristi, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi sebagai langkah paling akhir dalam sebuah penelitian sejarah.

Langkah awal adalah mencari sumber – sumber sampai mendapatkan data. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa artikel, buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Sumber primer yang dimaksud berupa buku-buku pokok tentang presiden Megawati yang dibuat pada tahun yang sama yaitu antara tahun 2001 – 2004. Sedangkan sumber sekunder adalah buku – buku yang menunjang tentang pembahasan skripsi yang dilakukan peneliti. Sumber itu diantaranya karya Tjahjo Kumolo,dkk (2004) yang berjudul “*Megawati Soekarnoputri Presiden Pilihan Rakyat*” dan karya Syamsu Hadi (2004) yang berjudul “*Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan ( Jilid 1 – Jilid 9 )*”.

Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengadakan kritik sumber, baik sumber primer maupun sekunder dilakukan kritik. (Sjamsudin, 1996:104). Kritik juga digunakan penulis dalam pengujian sumber-sumber sejarah agar menjadi sumber yang kredibel keasliannya Pada langkah kritik ini ada dua macam yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Dalam hal ini dilakukan penilaian secara kritis sumber – sumber yang telah didapat dengan cara membandingkan

persamaan ataupun perbedaan beberapa penafsiran dari buku-buku yang diperoleh dari setiap data. Dengan adanya kritik intern ini penulis bisa mengetahui apakah sumber yang digunakan tersebut sudah bisa menjadi fakta sejarah. Seperti halnya dalam buku *Spirit 7 Presiden RI* yang ditulis oleh Agustina Soebachman tahun 2015 yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Syura Media Utama.

Langkah selanjutnya adalah Kegiatan interpretasi yang merupakan proses penafsiran terhadap fakta – fakta yang ada untuk mendapatkan suatu makna yang saling berhubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya yang telah terhimpun dan berhubungan dengan dinamika politik saat Megawati menjadi presiden pada tahun 2001 sampai tahun 2004. Setelah itu dirangkai dan disusun dengan kronologis menjadi suatu peristiwa, sehingga dapat diperoleh suatu kisah sejarah atau cerita sejarah yang benar sesuai realita peristiwanya.

Langkah terakhir adalah menyusun hasil penelitian ini kedalam beberapa bab dan sub bab. Bab pertama berisi tentang latar belakang secara umum ke khusus, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi pendapat dan buku-buku serta sumber-sumber sejarah lainnya mengenai dinamika politik presiden Megawati tahun 2001-2004, serta teori yang cocok terhadap penelitian dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah skripsi ini, yang terdiri dari empat tahap metode penelitian yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Bab ini dipaparkan dan dijelaskan mengenai cara – cara yang digunakan peneliti dalam hal mengumpulkan sumber, data, dan merekonstruksi fakta sejarah yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh, kronologis, sistematis, serta rasional. Hasil penelitian dijelaskan pada bab 4, 5, dan 6. Bab 4 penulis memaparkan tentang keterlibatan Megawati dalam perpolitikan Indonesia sebelum tahun 2001. Pada Bab 5 menjelaskan mengenai kebijakan politik pemerintahan Megawati tahun 2001-2004. Bab 6 menjelaskan tentang dampak kebijakan politik pemerintahan Megawati tahun 2001-2004.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Megawati Dalam Panggung Politik Indonesia Sebelum Tahun 2001**

#### 1) Awal Perpolitikan Megawati

Megawati pertama kali terjun di dunia politik tahun 1987. Ketika itu PDI sedang mencari figur yang dapat menjadi penarik massa. Salah satu hal yang dianggap mampu menjadi perhatian khalayak waktu itu adalah dengan memunculkan dan memanfaatkan nama besar Bung Karno (Gautama, 39:2000). Maka diajaklah Megawati untuk membantu PDI guna lebih menambah bobot serta kualitas partai berlambang bintang tersebut. Peristiwa ini bagi keluarga Bung Karno sebenarnya masih dianggap tabu. Sebab sejak tahun 1982, keluarga Soekarno bersepakat untuk bersama-sama membangun Indonesia tanpa perlu mengikuti politik praktis apapun di salah satu golongan atau kekuatan sosial politik yang ada. Akan tetapi bagi Megawati, terjunnya di PDI itu dilakukan dengan alasan bahwa semua partai politik yang ada merupakan golongan yang berpegang tegu terhadap Pancasila.

Megawati memulai karir politik sebagai salah satu kader partai PDI Cabang Jakarta dan menempati posisi sebagai Ketua, sejak saat itu nama Megawati selalu dipasang dan digaungkan dalam setiap kampanye sehingga menarik banyak massa untuk mendukung PDI dalam merebut kekuasaan di pemerintahan. Sejak menjadi Anggota DPR Megawati menikah dengan Taufik Kiemas dan menjadi pasangan yang sama-sama duduk di bangku legislatif (Tempo, 25 Desember 1993, Diakses pada tanggal 12 January 2017). Pasangan inilah yang nantinya diharapkan akan menjadi pendongkrak suara PDI dan menjadi motor penggerak pengawalan kebijakan pemerintah di tingkat legislatif. Sebagai anggota DPR yang masih relatif baru tidak banyak yang dilakukan oleh Megawati, bahkan dinilai kurang banyak melakukan gebrakan-gebrakan layaknya seorang politikus pada umumnya. Di dalam banyak kesempatan, Megawati justru lebih banyak menampilkan sikap sebagai perempuan yang feminim dan lemah lembut.

#### **Megawati sebagai Wakil Presiden**

Pada tahap pertama pelaksanaan sidang Umum MPR 1999 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 1999 itu beberapa dampak yang merugikan sudah terjadi. Tiga peristiwa monumental dan cukup tidak menyenangkan bagi PDI Perjuangan selama

rangkaian SU-MPR 1999 adalah sebagai berikut : **Pertama**, mengalami kekalahan dalam pemilihan ketua MPR RI meskipun telah menjalin dukungan dengan fraksi besar lainnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **Kedua**, dalam pemilihan ketua DPR RI hal ini juga terulang kembali. PDI Perjuangan termasuk Megawati Soekarnoputri yang “terpaksa” melakukan lobi politik sendiri, kembali membuat deal dengan kekuatan politik yang selama ini dinilai bagian integral dari *status-quo*, yakni Golongan Karya. **Ketiga**, dalam rapat-rapat komisi dan pleno MPR juga terjadi masalah prinsip yang menunjukkan kekalahan PDI Perjuangan dalam menggolkan gagasan dan pemikirannya.

Kini, Megawati hanya terpilih sebagai Wakil Presiden RI Ke 8 dan gagal menjadi Presiden RI ke 4. Sebagaimana kekalahan itu terjadi pada sidang wakil-wakil rakyat, maka para wakil rakyat dari PDI Perjuangan, seperti Dimiyati Hartono sendiri, Aberson Marle Sihaloho, Kwik Kian Gie, Sucipto, Soetardjo Surjoguritno, Sabam Sirait, Laksamana Sukardi, dan Alex Litaay semestinya tampil dihadapan massa pemilihannya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dihadapan publik pemilih (Dirdjosisworo, 1999:21). Kegagalan inilah yang mengakibatkan merosotnya kinerja tim pemenang Megawati dalam merebut kursi parlemen dan mengantarkan sebagai Presiden keempat Indonesia.

## **Kebijakan Politik Pemerintahan Megawati Tahun 2001-2004**

### **Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Megawati**

Kebijakan politik presiden Megawati terangkum dalam Stabilitas Nasional, yang didalamnya terdapat ketahanan pangan, ekonomi, dan pemberantasan Korupsi di Indonesia yang akan dijabarkan di bawah ini :

#### **1) Stabilitas Nasional**

Pemerintah Megawati ketika itu dinilai tidak memiliki *sense of crisis*. Buktinya masih saja lebih mementingkan kepentingan politik golongan. Politik golongan ini masih sangat kuat dan kental di kalangan birokrat pemerintahan, sehingga mengakibatkan pada permainan politik dan pelaksanaan KKN (korupsi, kolusi, dan Nepotisme) semakin merajalela dan bermain teran-terangan. Pada sisi yang lain, masyarakat kehilangan *sense of unity*. Hal ini dapat dilihat dengan makin maraknya tuntutan kemerdekaan Aceh dan papua serta maraknya aksi teror bom di berbagai tempat di tanah air. Tentunya krisis persatuan ini semakin menunjukkan lemahnya kepemimpinan sosok Megawati karena dianggap

kurang bisa meredam pergerakan gerombolan masyarakat yang menginginkan perpecahan dan perpisahan dengan NKRI.

Agenda Reformasi yang ideal menjadi tolak ukuran keberhasilan bagi rapor pemerintahan Megawati, maka sudah pasti prestasi pemerintahan beliau jauh dari kata memuaskan. Kenyataannya selama berkuasa hampir 3 tahun, presiden Megawati masih belum mampu membasmi tuntas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Masalah penegakan hukum yang adil masih jauh dari harapan, salah satunya adalah mengadili Soeharto beserta para kronisnya tetap belum diwujudkan. Untuk soal yang satu ini kira-kira samalah dengan apa yang terjadi pada masa presiden B. J Habibie. Kalau Habibie merasa dilematis untuk mengadili Soeharto, entah apa yang sesungguhnya “menghalangi” Megawati untuk bersikap tegas terhadap Soeharto beserta para kroninya. Padahal, Megawati dahulunya dijegal oleh rezim Soeharto ketika terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Sedangkan kebijakan politik dalam rangka menjaga stabilitas nasional adalah dengan menjual beberapa aset negara kepada pemerintah asing.

Dalam hal stabilitas ekonomi, pemerintahan presiden Megawati lebih menekankan pada aspek perbaikan sektor perbankan dan ekonomi masyarakat umum. Dalam artian perbankan di dalam negeri selalu diberikan stimulus dan dana segar untuk menyelamatkan perekonomian bangsa dari inflasi yang semakin tinggi, hal ini terus dilakukan karena memang melihat faktor akibat runtuhnya rezim orde baru memberikan dampak yang luar biasa bagi pemimpin penerus setelahnya. Sedangkan dalam perekonomian masyarakat lebih menekankan pada aspek menjaga kestabilan harga-harga bahan pokok rumah tangga untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia pada waktu itu.

## 2) Pemberantasan Korupsi

Langkah pertama dan utama kebijakan Presiden Megawati dalam memerangi Korupsi adalah regulasi. Sebagai negara hukum sesuai pasal 1 UUD 1945, UU merupakan landasan untuk sebuah pemerintahan dapat berjalan dalam koridor yang telah dibentuk. Agar implementatif, UU harus dilengkapi perangkat aturan turunannya yang bersifat teknis yang memang sudah menjadi kewenangan presiden, seperti PP, keputusan presiden (Keppres) dan instruksi presiden (Inpres).

Selanjutnya akan dibahas mengenai kebijakan yang dilakukan pemerintahan Megawati untuk memberantas praktek Korupsi yang dibagi dalam empat tahap sebagaimana berikut :

*Pertama*, laporan evaluasi Repeta 2001 menyimpulkan bahwa usaha memerangi korupsi pada tahun 2001 masih belum menunjukkan hasil nyata. *Kedua*, Berdasarkan laporan hasil evaluasi, disimpulkan bahwa program Repeta 2001 dinilai tidak sepenuhnya terlaksana. *Ketiga*, apa yang sudah dicapai pemerintahan Megawati pada tahun 2002, menurut uraian laporan Repeta 2003, telah mendapatkan apresiasi positif. *Keempat*, Capaian pemerintahan Presiden Megawati dengan mengesahkan lima UU dan sembilan aturan pelaksanaan pada tahun 2003, menjadi sangat penting akan memasuki tahun 2004. Karena Repeta 2004 merupakan pelaksanaan tahun terakhir Propenas 2001-2002-2004.

### 3) **Kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintahan Megawati**

Program pelaksanaan luar negerinya, Megawati melakukan kunjungan ke beberapa negara sahabat, di antara Rusia, Jepang, Malaysia, New York, Rumania, Polandia, Hungaria, Bangladesh, Mongolia, Vietnam, Tunisia, Libya, Cina dan juga Pakistan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melakukan hubungan kerja sama diplomatik antar negara sahabat. Dari beberapa kali kunjungan ke luar negeri tersebut Megawati juga mendapatkan beberapa kritikan dalam negeri, hal tersebut dianggap wajar karena memang kondisi di Indonesia masih belum stabil sepenuhnya.

Membaiknya hubungan dengan Amerika Serikat setelah agak surut pada masa presiden Abdurrahman Wahid merupakan momentum bagi pemerintahan presiden Megawati untuk memulihkan kondisi ekonomi dan investasi dalam negeri. Persetujuan atas kerja sama yang dilakukan Indonesia bersama Amerika Serikat itu dalam memerangi terorisme menghasilkan beberapa komitmen sebagai hasil dari persetujuan tersebut. Beberapa komitmen antara Amerika Serikat dan Indonesia yang berhasil dibangun pasca peristiwa WTC, yaitu antara lain:

*Pertama*, menjaga keteraturan hubungan militer Indonesia dan militer AS untuk terus bekerja sama. *Kedua*, mengadakan kerjasama bilateral dalam hal penanggulangan terorisme. *Ketiga*, mengajukan permohonan kepada kongres AS untuk memberikan latihan



dan pendidikan masalah pertahanan bagi Indonesia. *Keempat*, menghentikan embargo peralatan militer bagi Indonesia yang telah lama dilakukan oleh AS.

### **Militer dan Pertahanan**

Megawati juga melakukan kunjungan dan kerjasama militer dengan Rusia, kunjungan kerja tersebut dilakukan pada tanggal 20-23 April 2003 yang menghasilkan deklarasi kerjasama antar negara Indonesia dan Rusia dalam bidang Pertahanan dan sebagai negara sahabat. Kerjasama tersebut juga menghasilkan pembelian peralatan militer berupa empat pesawat jet jenis Sukhoi produksi militer Rusia. Pembelian tersebut tidak lepas dari keinginan presiden Megawati untuk menambah jumlah armada tempur Indonesia angkatan udara.

Kerjasama yang dilakukan presiden Megawati dengan pemerintah Rusia ini terbagi dalam tiga aspek, yaitu. *Pertama*, bidang politik, *Kedua*, bidang ekonomi dan perdagangan. *Ketiga*, bidang industri militer,

#### 1) Penanggulangan Terorisme

Kebijakan melawan teroris memang menjadi fokus dalam politik luar negeri di masa Presiden Megawati. Indonesia, kemudian aktif menggalang dukungan internasional, terutama di negara-negara kawasan Asia Tenggara, untuk memerangi terorisme. Di dalam negeri pemerintahan Megawati mengeluarkan Perpu tentang Anti Terorisme, kemudian disahkan menjadi UU Anti-Terrorisme. Melalui UU inilah pelaku bom Bali dapat dijerat di depan hukum dan dijatuhi hukuman mati. Secara internasional, Indonesia tidak mau hanya menggantungkan dukungan dari Amerika Serikat saja, jika ini dilakukan, pemerintahan Megawati tidak akan populer di mata rakyat (Santosa, 1996:53). Sentimen anti Amerika Serikat berkembang cukup kuat di Indonesia setelah Amerika menyerang Afganistan dan Irak, dua negara muslim yang memiliki keterkaitan emosional dengan Indonesia. Maka pemerintahan Megawati harus sangat berhati-hati dan bijaksana dalam bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme.

#### 2) Hutang Luar Negeri

Pemerintahan presiden Megawati mendapatkan warisan hutang luar negeri yang cukup besar dari pemerintahan orde baru yaitu sekitar Rp1.273,18 triliun pada tahun 2001 dan

turun menjadi Rp1.225,15 triliun pada 2002, mengalami penurunan sekitar Rp48,3 triliun. Hutang luar negeri indonesia ini tidak lepas dari proses pembangunan jangka panjang infrastruktur indonesia yang dilakukan sejak pemerintahan orde baru, mulai dari pembangunan jalan, pembangunan tol, dan pembangunan infrastruktur publik lainnya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi indonesia kedepannya. Namun, sejak pemerintahan Megawati berjalan, hutang indonesia bukan mengalami penurunan, malah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu total hutang negara Indonesia menjadi Rp1.299,5 triliun. Jumlah hitungan rata-rata hutang pemerintahan Megawati adalah sekitar Rp25 triliun tiap tahunnya. Peningkatan hutang ini tidak lepas dari penyelesaian masalah stabilitas nasional, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya yang kesemrawutannya diwariskan oleh pemerintahan orde baru. Semua kesepakatan pinjaman dan hutang luar negeri yang dilakukan pemerintah indonesia masa Presiden Megawati ini dilakukan dengan lembaga donor CGI (*Consultative Groups on Indonesia*).

### **Dampak Kebijakan Politik Pemerintahan Megawati Tahun 2001-2004**

#### **Dampak Kebijakan Politik Dalam Negeri Pemerintahan Megawati**

Presiden Megawati mengeluarkan beberapa kebijakan politik yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Salah satunya adalah kebijakan politik dalam negeri. Ada beberapa dampak dan reaksi dari dikeluarkannya kebijakan tersebut di aspek Politik, Sosial dan Ekonomi. Sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini

##### **1. Dampak Politik**

Sistem Politik Indonesia Pasca dimakzulkannya Presiden Abdurrahman Wahid dari Kursi Kepresidenan berjalan sangat cepat dan tanpa kendali, akhirnya pergolakan kaum intelektual yang ada di indonesia semakin tidak bisa dilihat arah perjuangannya. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi indonesia dalam bidang politik, karena dengan perpecahan ini semakin jelas mana parttai politik yang mendukung program pemerintah dan mana partai politik yang berseberangan dengan pemerintah. Hal ini juga memberikan dampak bagi masyarakat indonesia dalam aspek kerukunan umat beragama dan kerukunan antar suku, sehingga menimbulkan gejolak horizontal yang setiap hariya semakin menjadi-jadi (Kumolo, 2004:32). Proses pergeseran kekuasaan inilah yang

menandai semakin besarnya pengaruh kelompok ideologis untuk menunukkan kekuatan pribadi dalam pemerintahan indonesia.

## 2. Dampak Sosial

Mengenai dampak sosial dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan presiden Megawati tentunya dilatar belakangi dan dijadikan pertimbangan adalah lepasnya Timor-Timor dari pangkuan ibu pertiwi, sehingga hal tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk dijadikan pertimbangan bagi daerah lain yang bergejolak melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat, salah satunya adalah pemberian otonomi khusus bagi daerah-daerah tersebut, seperti Nanggroe Aceh Darussalam. pemberian otonomi khusus ini dilatar belakang untuk meredam aksi yang lebih besar lagi yang akan dilakukan oleh dua wilayah yang saling berjauhan ini.

Daerah-daerah yang bergejolak tentunya memiliki catatan kelam dalam hal penuntasan hukum dan keadilan bagi semua pihak. Daerah-daerah tersebut menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) yang sejak lama memiliki pelanggaran HAM yang cukup berat karena telah banyak memakan korban. Sehingga rakyat pada waktu itu tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap pemerintah pusat walaupun sudah dua kali mengalami pergantian kepemimpinan di indonesia.

## 3. Dampak Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, pemerintahan presiden Megawati dianggap sukses memajukan perekonomian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat indonesia, hal tersebut bisa dilihat dari harga sembako yang stabil dan jumlah pengangguran yang bisa ditekan oleh negara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi meningkat hampir mencapai 5%. Selain itu juga, tingkat perkembangan laju suku bunga indonesia (SBI) mengalami penurunan yang cukup signifikan yang mencerminkan bahwa kondisi perekonomian dalam negeri sudah stabil (Lesmana, 2009:67). Stabilitas ekonomi ini tentunya menjadi penyemangat pemerintah untuk terus berbenah dan memperbaiki sektor lainnya.

### **Dampak Kebijakan Politik Luar Negeri Pemerintahan Megawati**

Kebijakan politik luar negeri Megawati hanya di fokuskan kepada kunjungan Presiden Amerika Serikat George W. Bush di Bali, serta kunjungan Megawati ke negara Korea Utara, dan Korea Selatan. Dari kunjungan tersebut memiliki beberapa dampak, salah satunya adalah di bidang politik, sosial, dan budaya sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini.

#### **1. Dampak Politik**

Kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintahan presiden Megawati tentunya juga memberikan dampak tersendiri, dalam bidang politik tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di dalam negeri, salah satunya adalah gejolak di setiap daerah yang ingin melakukan makar dan pemisahan diri dari NKRI, sehingga hal tersebut mengundang beberapa negara lain untuk ikut andil dalam rangka menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya adalah kerjasama militer yang dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Rusia. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada pembelian alat-alat militer saja, melainkan kerja sama dalam rangka penganggulangan terorisme dan penyelesaian masalah ataupun konflik internal di dalam negeri (Widhiasih, 2013:12). Langkah ini menjadi awal hubungan baik Indonesia dengan Rusia dalam hal militer. Karena memang tidak bisa dipungkiri lagi, Rusia menjadi salah satu kekuatan dunia yang pengaruhnya sudah sampai ke Indonesia.

#### **2. Dampak Ekonomi**

Dalam bidang ekonomi, pemerintahan presiden Megawati memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia kedepannya, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah kerja sama dengan luar negeri yang menjamin pinjaman uang akan selalu tersedia bagi bangsa Indonesia jika dibutuhkan kapan saja dalam rangka menyokong dan membantu pembangunan infrastruktur yang sedang dibangun dalam negeri. Hal ini tentunya memberikan kemajuan bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan fasilitas yang lebih modern untuk memajukan perekonomian bangsa dan negara, sedangkan dampak negatifnya adalah bertambahnya hutang luar negeri Indonesia setiap tahunnya. Tentu dengan adanya hutang luar negeri ini pemerintahan Indonesia akan selalu terikat dengan perjanjian-perjanjian yang telah diberikan oleh pihak

peminjam hutang, salah satunya adalah lepasnya bada-badan usaha milik negara (BUMN) yang dijula ke pihak asing.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Masa Kecil di Pengungsian)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Dalam Bimbingan Bung Karno)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Di Tengah Perebutan Kekuasaan)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Tegar Menghadapi Musibah)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Menempa Diri di Kebagusan)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Melawan Politik Orde Baru)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Diganjal Di Puncak Kemenangan)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Menyelamatkan Kapal Yang Nyaris Runtuh)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Hadi, Syamsu. 2004. *Presiden Megawati Liku – Liku Kehidupan (Mengantar Ke Masa Depan)*. Jakarta : Pustaka Simponi
- Kumolo, dkk. 2004. *Megawati Soekarnoputri Presiden Pilihan Rakyat*. Jakarta : Global Publika
- Ma'ruf, Ade. 2013. *Megawati Soekarnoputri Riwayat Pribadi Dan Politik Putri Bung Karno*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media